

**PENINGKATAN PERANAN WANITA DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA**

Oleh :

Dra. Sjamsiah Achmad, MA.

(Asmen Bidang Pendidikan Wanita, Kantor Meneg UPW)

Disampaikan pada seminar:

**Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya
Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia**

21-22 September 1993, Kampus IPB Darmaga Bogor

**PENINGKATAN PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Oleh :
Sjamsiah Achmad

PENDAHULUAN

Sesuai dengan judul Seminar dan judul sesi 5 ini, yaitu "*Peran Jender dan Kehidupan Keluarga*" serta judul makalah yang diminta Panitia dari kami yaitu; "*Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*", maka makalah ini akan mencoba melihat pengaruh peningkatan kedudukan wanita dalam pembangunan (yang sering disingkat Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan) atau P2W terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam konteks Peran Jender dalam Keluarga dan UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Untuk mendorong tumbuhnya diskusi-diskusi yang mengarah pada tercapainya pemahaman bersama tentang saling pengaruh mempengaruhi serta saling ketergantungan antara peran jender dalam kehidupan keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan Peningkatan Peranan Wanita, maka makalah ini akan terdiri dari uraian-uraian tentang : I. Peran Jender dan Kaitannya dengan Kedudukan dan Peranan Wanita, II. Keberhasilan P2W dalam mengembangkan Pola Pikir dan Peran Jender yang serasi, selaras dan seimbang, III. P2W dan kaitannya dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

**I. PERAN JENDER DAN KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN
DAN PERANAN WANITA.**

Seperti kita ketahui peran jender adalah peran yang merupakan hasil konstruksi sosial, jadi hasil sosialisasi dan pembelajaran, yang telah secara jelas membagi dan membangun stereotip wanita dan stereotip pria dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Jender juga merupakan hubungan struktural yang tidak seimbang antara pria dan wanita, yang menempatkan wanita pada kedudukan yang dianggap lebih rendah dan kurang penting, karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Jender juga menempatkan pria dan wanita pada posisi yang dianggap pantas bagi masing-masing yaitu wanita dalam keluarga, pria dalam masyarakat.

Dalam proses industrialisasi, stereotip yang menempatkan wanita pada posisi yang lebih rendah dan kurang penting karena tidak atau kurang ekonomis produktif ini dikukuhkan oleh peraturan perundang-undangan dan sistem produksi barang. Wanita pada umumnya dilihat dan diperlakukan sebagai obyek pembangunan. Selanjutnya dalam era perencanaan pembangunan, sejak berakhirnya Perang Dunia kedua sampai awal tahun tujuh puluhan, stereotip ini juga masih mendominasi kebijaksanaan pembangunan, walaupun persamaan hak pria wanita telah diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perjuangan wanita sendiri untuk memajukan diri sebagai mitra sejajar pria secara nyata berawal pada zaman Revolusi Perancis menjelang akhir abad ke-18, disusul dengan demonstrasi wanita dari industri tekstil dan garmen di jalan-jalan di New York pada tanggal 8 Maret 1857 yang menuntut hak kerja dan kondisi kerja yang lebih manusiawi. Selanjutnya, Kongres Pertama Asosiasi Pekerja Internasional tahun 1866 mengeluarkan resolusi tentang kerja profesional wanita. Revolusi ini secara terbuka menantang tradisi bahwa tempat wanita adalah di rumah. Tanggal 19 Juli 1889 Clara Zetkin berbicara pada the Founding Congress of the Second International di Paris tentang permasalahan wanita. Ia mengkampanyekan hak wanita untuk bekerja serta perlindungan ibu dan anak, maupun perluasan partisipasi wanita dalam peristiwa-peristiwa nasional dan internasional. Pada tahun 1899, di Den Haag negeri Belanda konperensi wanita menentang perang, merupakan titik awal gerakan anti perang yang berlanjut menyongsong abad ke-20. Pada tahun 1910, atas desakan Clara Zetkin -anggota International Ladies Garment Workers Union, the Second International Conference of Socialist Women memproklamirkan Hari Wanita International 8 Maret. Pada tahun 1911, tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Wanita International untuk pertama kalinya di Austria, Denmark, Jerman dan Swiss. Lebih sejuta orang, wanita dan pria berpawai. Di samping menuntut hak pilih dan hak-hak untuk bekerja, hak untuk mengikuti pelatihan kejuruan dan penghapusan diskriminasi dalam dunia kerja. Tahun 1914, Hari Wanita Internasional diperingati dengan gerakan perdamaian untuk memprotes perang yang mulai berkecamuk di Eropa. Sejak itu makna peristiwa 8 Maret terus berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Mereka mulai mengkoordinasi upaya, menelaah kemajuan perjuangan mereka untuk persamaan hak, kemajuan sosial ekonomi dan perwujudan hak-hak mereka sebagai manusia secara penuh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sidang Majelis Umumnya yang ke 32 pada tahun 1977 mengeluarkan resolusi 32/142 mengundang setiap negara memproklamirkan, sesuai dengan sejarah dan tradisi nasional serta adat istiadatnya, suatu hari dalam setahun sebagai Hari PBB untuk Hak-hak Wanita dan Perdamaian Dunia. Maka kebanyakan negara memilih 8 Maret.

Karena perjuangan wanita sendiri di berbagai pelosok dunia yang kemudian didukung oleh pemerintah dan PBB, maka peran jender wanita dan pria yang stereotip secara berangsur-angsur berubah. Perlahan di beberapa kelompok atau negara, lebih cepat di berbagai kelompok atau negara lain. Akan tetapi ada satu hal yang sama di semua kelompok atau negara ialah bahwa wanita lebih cepat dapat berperan dalam keluarga. Dengan demikian maka terjadilah ketidakseimbangan baru, yaitu wanita tetap berperan dan bertanggung jawab hampir penuh di dalam keluarga dan sekaligus berperan penuh dalam dunia kerja serta secara berangsur-angsur juga lebih berperan dalam kehidupan sosial budaya dan sosial politik di luar keluarga. Maka pengentasan wanita dari ketidakseimbangan peran jender yang stereotip, yang tidak memberi kesempatan pada wanita berperan di luar lingkungan keluarga pada hakekatnya tidak mencapai keseimbangan, tetapi malahan memperbesar ketidak-seimbangan itu atau memperberat beban wanita karena peran dan tanggung jawabnya menjadi lebih luas dibanding pria.

Dengan peran dan tanggung jawab yang semakin lebih besar, maka kesempatan wanita untuk mengembangkan diri atau meningkatkan kualitas diri, apalagi untuk menikmati waktu senjang atau berekreasi menjadi semakin kecil. Selain dari pada ini kita di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, belum sepenuhnya berhasil dalam upaya mengubah persepsi pria dan wanita sendiri tentang hubungan mereka satu dengan lainnya. Dari hubungan penanggung jawab sebagai ibu rumah tangga (yang bertugas mengurus segala sesuatunya di samping mengandung, melahirkan dan membesarkan/mendidik anak) dan kepala keluarga (yang bertanggung jawab mencari nafkah, serta memutuskan segala sesuatu bagi keluarga termasuk pemanfaatan sumber daya keluarga, baik manusia maupun barang dan uang), menjadi hubungan suami isteri atau ibu-bapak/orang tua yang merupakan mitra sejajar, yang masing-masing mandiri dalam kebersamaan. Upaya ini harus meningkatkan peranan wanita atau untuk mencapai kemitra-sejajaran pria wanita, tetapi juga karena suami isteri atau orang tua pada hakekatnya dan idealnya adalah dwitunggal. Kemitra-sejajaran atau peran jender pria dan wanita yang serasi dan selaras serta seimbang dalam keluarga dan masyarakat sesungguhnya bukanlah merupakan tujuan akhir peningkatan peranan wanita, tetapi merupakan suatu situasi dan kondisi yang merupakan kebutuhan dan perlu untuk dapat diwujudkan bersama guna memungkinkan dan memampukan wanita dan pria bersama-sama memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa di semua bidang dan pada semua tingkat dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat wanita.

II. KEBERHASILAN P2W DALAM MENGEMBANGKAN POLA PIKIR DAN PERAN JENDER YANG SERASI, SELARAS DAN SEIMBANG

Sebagai salah satu upaya nasional yang merupakan bagian integral dari upaya pembangunan bangsa, atau pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta peningkatan kualitas manusia Indonesia, maka P2W mempunyai beberapa tujuan antara. Salah satu di antaranya ialah terciptanya pola pikir dan terwujudnya perilaku jender masyarakat, pria wanita, tua dan muda, yang serasi, selaras dan seimbang.

Pola pikir dan peran jender yang serasi, selaras dan seimbang ialah pola pikir yang memandang dan memperlakukan wanita dan pria sebagai warga negara, sumber insani dan kekuatan utama bagi pembangunan, serta memandang peningkatan kualitasnya dan kualitas hidupnya sebagai tujuan akhir pembangunan. Sejalan dengan ini, juga memandang, mengakui dan memperlakukan wanita dan pria sebagai manusia yang mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama pada semua bidang di semua tingkat kegiatan. Selanjutnya juga mengakui bahwa kodrat wanita, yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui anak dengan ASI adalah rahmat Tuhan YME dan karenanya harus dihargai, dilindungi dan didukung oleh semua, pria wanita, tua muda, pemerintah dan masyarakat maupun oleh sistem hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini juga berarti menyadari, menghayati dan mengakui bahwa kepentingan dan aspirasi serta peranan wanita dan pria dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat tidak semua dan tidak selalu sama.

Pola pikir yang berwawasan jender selalu memandang dan memperlakukan pria dan wanita sebagai dua makhluk yang mempunyai kedudukan, harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Sebagai manusia perbedaan mereka hanya terletak pada kodrat wanita sebagai pengemban sebagian terbesar dari fungsi reproduksi dan pembinaan sumberdaya manusia yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui anak dengan ASI.

Peran jender yang serasi, selaras dan seimbang tidak dapat diinterpretasikan secara matematis, karena kodrat wanita maupun kodrat pria yang berkaitan dengan fungsi reproduksi dan pembinaan sumberdaya yang sebagian terbesarnya diemban oleh wanita, tidak dapat dipertukarkan. Karenanya sangatlah penting untuk menjaga agar peran-peran lainnya atau peran jender dibagi sedemikian rupa dengan memperhitungkan kodrat wanita.

Hal ini menjadi lebih penting, sangat penting, bahkan menjadi keharusan bagi kita di Indonesia untuk segera mewujudkan peran jender yang serasi, selaras, dan seimbang, karena wanita sudah semakin berperan karena memang

sudah lebih mampu berperan di luar lingkungan keluarga utamanya sebagai tenaga kerja, untuk mewujudkan persamaan hak, kewajiban dan kesempatannya dengan pria dalam pembangunan, ataupun untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya.

Tingkat penerapan pola pikir yang berwawasan jender dan perilaku jender yang serasi, selaras dan seimbang dalam masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti tingkat pendidikan, status kesehatan dan gizi, tingkat partisipasi (kuantitatif dan kualitatif) dalam angkatan kerja, dalam politik, organisasi kemasyarakatan) dalam kegiatan pelestarian pengembangan dan apresiasi budaya, dan lain-lain.

Tetapi kalau kita memperhatikan data dan informasi yang disajikan dalam Indikator Sosial Wanita 1989, sampai 1992 yang diterbitkan Biro Pusat Statistik, maka jelas bahwa pergeseran kearah pencapaian tujuan P2W atau kearah kedudukan dan peran wanita dan pria yang serasi, selaras dan seimbang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berjalan terus. Dalam berbagai aspek cukup memuaskan mengingat masih adanya kendala-kendala, tetapi dalam aspek lain dapat dikatakan terlalu lambat, disebabkan kekurangmampuan secara teknis ataupun dalam mengubah sikap mental dan perilaku untuk menerapkan berbagai kebijaksanaan maupun peraturan perundangan yang sebenarnya cukup maju.

Maka dapat disimpulkan bahwa wujud keberhasilan P2W ialah memasyarakatnya pola pikir yang berwawasan jender dan peran jender yang serasi, selaras dan seimbang. Selain itu, juga jelas bahwa tanpa pola pikir dan perilaku yang berwawasan jender, P2W sebagai bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya serta peningkatan kualitas manusia dan kualitas hidupnya sulit berhasil. Hal ini utamanya penting bagi pengelola pembangunan, mulai dari peneliti dan pengkaji masalah-masalah pembangunan sampai kepada para perumus kebijaksanaan, perencana, pelaksana, pemantau, pengawas dan pengendali serta penelaah hasil-hasil pembangunan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah dampak kegagalan mewujudkan peran jender yang serasi, selaras dan seimbang dalam keluarga atau dampak kegagalan P2W pada keluarga utamanya terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

III. P2W DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pembahasan tentang pengaruh P2W terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam makalah ini mengacu pada UU No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang

salah satu pertimbangannya ialah belum adanya peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 15 tentang ketahanan keluarga mengatakan: "*Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin*"

Bab II Azas, Arah dan Tujuan pasal 3 ayat (2) menyatakan "*Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pengembangan kualitas melalui upaya keluarga berencana dalam rangka membudayakan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera*". Bab III Hak dan Kewajiban pasal 7 mengatakan "*Setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya ideal atau mengangkat anak atau memberikan pendidikan kehidupan berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain guna mewujudkan keluarga sejahtera*".

Bab VI Pembangunan Keluarga Sejahtera yang terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Pertama tentang Kualitas Keluarga, Bagian Kedua tentang Keluarga Berencana. Pasal 15 ayat (2) menetapkan bahwa '*kualitas keluarga*' berciri '*kemandirian*' dan '*ketahanan keluarga*' sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dari pasal-pasal tersebut di atas maupun dalam pasal-pasal lainnya tentang Kependudukan jelas, bahwa Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan faktor penentu bagi keberhasilan pengembangan kependudukan maupun bagi pembangunan keluarga sejahtera.

Dari perspektif P2W ketahanan keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan suami isteri atau ibu bapak sebagai orang tua berperan sebagai dwitunggal yang ditandai oleh kemampuan masing-masing mewujudkan pola pikir yang berwawasan jender dan peran jender yang serasi, selaras dan seimbang atas dasar sikap saling menghargai, saling membantu, saling isi mengisi, saling kasih mengasihi serta saling cinta mencintai.

Hanya dengan kualitas hubungan suami isteri atau ibu bapak sebagai orang tua serupa ini keluarga dapat berhasil, baik sebagai wahana pertama dan utama bagi pembinaan sumber daya manusia, sebagai unit pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, maupun sebagai unit ekonomi yang terkecil tapi sangat menentukan.

Dengan lain perkataan, keberhasilan P2W dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga, saling terkait dan saling tergantung. Hal ini demikian, karena

wanita secara kuantitatif melebihi setengah dari keseluruhan sumber insani pembangunan, secara kualitatif wanita sebagai ibu bangsa lebih banyak menentukan kualitas generasi yang akan datang dari pada pria, karena kodratnya sebagai pengemban sebagian terbesar dari fungsi reproduksi dan pembinaan sumberdaya manusia.

PENUTUP

Untuk masa yang akan datang, utamanya selama PJP II, P2W antara lain harus lebih banyak memperhatikan dan mengusahakan agar perluasan peran dan tanggung jawab wanita utamanya ke dalam dunia kerja, diimbangi dengan penyesuaian-penyesuaian atau perubahan struktural dari sistem ketenagakerjaan, antara lain yang berkaitan dengan sistem penempatan dan mutasi, agar lebih memperhitungkan kepentingan pasangan yang kedua-duanya berkarir, di samping peningkatan peranan pria dalam penanganan kehidupan berkeluarga yang meliputi pekerjaan rumah tangga, pembinaan sumberdaya manusia atau pelaksanaan tugas sebagai orang tua dan tugas-tugas keluarga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. GBHN 1978, 1983, 1988 dan 1993 tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa.
2. Repelita III, IV dan V
3. UU No.7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
4. UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. UU No.10 tahun 1992 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. Laporan Konperensi Dunia PBB tentang Wanita tahun 1975 di Mexico City, tahun 1980 di Kopenhagen dan tahun 1985 di nairobi.
7. Survey Dunia tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan oleh PBB tahun 1984 dan tahun 1989.
8. Women News dan Women 2000 terbitan berkala PBB 1984-1992.